

## **BAB V**

### **KESIMPULAN**

Amerika Serikat menentang keras program pengembangan nuklir oleh Iran karena meyakini bahwa yang berusaha dilakukan oleh Iran ialah perakitan senjata pemusnah massal atau *weapon of mass destruction* (WMD). Iran sendiri, bersikeras bahwa yang dilakukan oleh pihaknya hanyalah pengembangan teknologi nuklir yang difungsikan untuk tujuan damai yakni sebagai isotop kesehatan dan sumber energi alternatif. Akan tetapi, kapabilitas yang dimiliki oleh Iran beserta status pengayaan di beberapa reaktor air berat seperti di Arak dan Natanz, membuat dunia internasional merasa perlu mengawasi lebih jauh, dan pada akhirnya melihat status pengayaan Iran melebihi kapasitas pengayaan apabila ingin difungsikan sebagai isotop kesehatan maupun energi. Menurut spekulasi beberapa pihak termasuk badan pemeriksa aktifitas nuklir dunia IAEA, dengan kemampuan yang dimiliki oleh Iran saat ini, Iran mampu menghasilkan senjata nuklir dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun jika negara tersebut menginginkannya.

Amerika Serikat menggunakan kekuatannya sebagai negara adidaya saat ini untuk mengintervensi program nuklir Iran dengan menerapkan dan menunjukkan sikap dominasi dan hegemoni. Meskipun secara definisi AS saat ini bukanlah negara yang memiliki kekuatan dominasi dan hegemoni secara mutlak, namun pada kenyataannya dunia internasional mengakui kedigdayaan Amerika. Syarat utama negara dominan

dan hegemon adalah bahwa negara tersebut mampu menjaga stabilitas sistem internasional melalui kekuatan ekonomi, politik dan militer yang ia miliki. Namun, jika negara dengan kekuatan yang mendominasi dan hegemonik tidak mampu menjaga stabilitas sistem internasional, akan muncul kekuatan lain yang menentangnya. Amerika Serikat melihat Iran, dengan kekuatan nuklir yang dimilikinya, mempunyai potensi sebagai kekuatan penentang tersebut.

Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat terhadap Iran melalui isu nuklir dan senjata pemusnah massal merupakan bagian strategi Amerika untuk “memaksa” dunia internasional mengakui dominasi dan hegemoninya. Berdasarkan uraian di bab-bab sebelumnya, penulis menyimpulkan beberapa poin penting. *Pertama*, AS ingin menunjukkan sekaligus “memaksa” dunia internasional untuk mengklaim bahwa ia merupakan negara adidaya tanpa tandingan di abad ke-21 ini. Dengan demikian, dunia internasional harus mematuhi dan mengikuti keinginan Amerika; jika tidak, Amerika akan mengintimidasi atau bahkan menjatuhkan sanksi.

*Kedua*, Amerika Serikat tidak menginginkan adanya kekuatan baru yang mampu mengimbangi, menyaingi dan membahayakan kepentingannya di Timur Tengah. Iran dianggap negara yang dapat membahayakan Amerika dan sekutu abadinya Israel melalui program nuklir yang tengah ia kembangkan. Jika program nuklir Iran dibiarkan atau bahkan tidak diintervensi melalui sanksi-sanksi dari PBB dan kecaman dunia internasional, maka kepentingan Amerika di Timur Tengah tidak dapat terwujud. *Ketiga*, Amerika Serikat berkepentingan menjaga eksistensi sekutu

abadinya Israel di Timur Tengah. Atas dasar ini, Amerika dapat berdalih untuk memasuki kawasan Timur Tengah dengan mengatasnamakan misi perdamaian dan keamanan internasional. Program nuklir Iran dianggap oleh AS sebagai membahayakan eksistensi Israel sehingga ia harus dilawan.

*Keempat*, Iran merupakan negara kawasan Timur tengah yang sangat prospektif, baik ditinjau dari geostrategi maupun geoenergi. AS merupakan negara industri yang membutuhkan energi sebagai penopang operasional perusahaan, industri, dan kebutuhan operasional kegiatan militernya. Oleh karena itu, Amerika Serikat berkepentingan akan wilayah Iran yang kaya akan sumber daya alam. *Kelima*, Iran merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah Muslim Syi'ah. Gerakan politik Islam Syi'ah Iran sangat "militan" dalam menjaga kedaulatan Iran dari penguasaan pihak asing, terlebih lagi pasca Revolusi Islam tahun 1979. "Militansi" Islam Syi'ah Iran membuat Amerika khawatir akan kemajuan dan kekuatan dari gerakan politik Islam yang sewaktu-waktu dapat mengancam dan membahayakan kepentingan Amerika baik di kawasan maupun secara global. Amerika Serikat dan Israel berusaha agar gerakan politik Islam Iran tidak berkembang menjadi kekuatan baru di kancah internasional. Amerika juga mengantisipasi agar gerakan politik Islam pada peristiwa revolusi Islam Iran tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap negara-negara Islam lainnya. Dalam konteks ini, menyerang program nuklir Iran adalah faktor penting bagi Amerika Serikat untuk mencegah kekhawatiran itu menjadi kenyataan.

Nuklir Iran sendiri pada mulanya merupakan hasil kerjasama antara Amerika Serikat dengan Iran saat Iran masih berada dalam pimpinan Shah. Namun, semenjak terjadi revolusi islam di Iran, ideologi kedua negara ini menjadi berseberangan dan Amerika Serikat mulai mengancam aktifitas apapun di Iran yang terkait dengan nuklir. Dilihat dari segi hal yang mempengaruhi, Kebijakan Luar negeri Amerika Serikat dalam merespon isu nuklir di Iran dalam masa pemerintahan Bush dan Obama memiliki identitasnya masing-masing. keduanya memiliki cara yang berbeda dalam mengekspresikan langkah mereka, dimana Bush secara eksplisit menempatkan ancaman tersebut sebagai *'rogue states'* sementara Obama lebih cenderung mempersepsikannya sebagai *'antinuclear agenda'* pada praktiknya kedua pemimpin tersebut memfokuskan aksi menangkal proliferasi dari negara-negara yang kontra Amerika seperti Iran, Iraq, dan Korea Utara dibandingkan dengan negara-negara pro Amerika seperti Pakistan, India, dan Israel.

Bush cenderung konfrontatif, koersif, dan tidak segan-segan menggunakan kekuatan militer. Sedangkan Obama, sejak awal pemerintahannya menjanjikan perubahan pendekatan terhadap negara-negara muslim seperti negara di kawasan Timur Tengah, dan mengupayakan diplomasi dan negosiasi demi mencapai kesepakatan dengan Iran. Terjadi perubahan dalam kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap Iran terjadi dalam tingkatan individual, dimana hal yang mempengaruhi adanya perbedaan pendekatan tersebut ialah pribadi masing-masing pemimpin dalam merespon tantangan pembuatan kebijakan luar negerinya.

Akan tetapi, seiring dengan berjalannya waktu, alih-alih berubah, kebijakan luar negeri Amerika Serikat terhadap nuklir Iran mayoritas memperlihatkan kemiripan. Terlihat bahwa baik pemerintahan Bush maupun Obama menempatkan proliferasi senjata pemusnah massal, khususnya senjata nuklir sebagai ancaman pada abad ke-21. Terutama pada kemungkinan bahwa senjata tersebut jatuh ke tangan teroris. Obama dalam masa pemerintahannya tidak hanya melanjutkan cara-cara koersif sebagaimana yang telah dilakukan oleh Bush serta memperketat beberapa sanksi yang telah dijatuhkan terhadap Iran sebelumnya akibat negeri para Mullah ini tidak mau bekerjasama untuk menghentikan aktifitas pengayaan uraniumnya.

Tujuan Amerika melakukan intervensi program nuklir Iran untuk sebagai pengakuan dunia internasional bahwa Amerika merupakan negara yang super power. Terkadang intervensi yang dilakukan oleh Amerika tidak logis, namun rasional jika Amerika benar-benar melakukannya untuk kestabilan keamanan kawasan Timur Tengah ataupun dunia. Namun yang menarik menurut penulis adalah ketika Amerika mengintervensi program nuklir Iran, di lain pihak Amerika tidak melakukan intervensi program nuklir negara-negara sekutunya khususnya Israel. Sikap ini menunjukkan bahwa Amerika melakukan politik *double standar*. Sebagai salah satu contohnya adalah kasus krisis legitimasi Iraq yang saat itu dipimpin oleh presiden Saddam Hussein. Dimana Saddam Hussein dinyatakan oleh Amerika melakukan tindakan yang melanggar hak asasi manusia terhadap rakyat Iraq. Namun di lain pihak

Amerika tidak berkomentar dan memprotes langkah Israel ketika melakukan penyerangan terhadap warga Gaza Palestina.

Padahal Amerika tidak perlu memprotes ataupun mengintervensi program nuklir yang diklaim Iran sebagai proyeksi energi alternatif. Sudah ada badan dan lembaga yang bertanggungjawab yang akan menindaklanjuti jika suatu negara (dalam hal ini Iran) melanggar ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam dunia internasional. PBB dan IAEA merupakan badan pengawas dan lembaga yang akan memberikan sanksi jika ada suatu negara melanggar ketentuan yang sudah disepakati oleh dunia internasional.

Namun demikian, Iran dapat dikatakan terpaksa untuk menyembunyikan program nuklir damai, di karenakan adanya upaya-upaya yang dilakukan Amerika Serikat untuk mencegah dan membatasi terciptanya kerjasama antara Iran dengan Negara manapun yang berkaitan dengan program nuklirnya.

